

EVALUASI IMPLEMENTASI HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU (STUDI KASUS DI KECAMATAN ULU MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Aprita Kurniawati¹, Yansen², Guswarni Anwar²

¹DLHK Provinsi Bengkulu, UPTD KPHL Bengkulu Selatan

²Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa isi izin HTR, menilai tingkat dukungan stakeholder dan tingkat partisipasi masyarakat dan merumuskan strategi implementasi HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2019-Juli 2019 di lokasi izin HTR Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Data primer diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara dengan para responden, dinas/instansi dan pihak terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau telaah literatur, dokumen, data dan informasi lain yang terkait dengan tercapainya tujuan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan SWOT. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa: masih terdapat perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan HTR, asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan struktur implementasi yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya, Tingkat kemampuan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan HTR termasuk dalam kategori rendah. Rekomendasi strategi yang dapat dikembangkan dalam implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah: Mengoptimalkan dukungan Pemda dalam percepatan implementasi HTR melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif dan menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu

Kata Kunci: hutan tanaman rakyat, implementasi, kelangkaan kayu, pemasaran

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi ekonomi dan ekologi. Nilai ekonomi hutan dapat memberikan dampak positif terhadap penyediaan lapangan kerja, mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Secara ekologi hutan mempunyai peran penting sebagai sistem penyangga kehidupan dunia. Hutan juga salah satu sumber daya alam yang mampu menyediakan bahan-bahan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, papan, obat-obatan, dan pendapatan keluarga, sudah seharusnya manusia mengupayakan pengelolaan hutan secara lestari agar tetap bisa memanfaatkan hasil hutan di masa mendatang. Kenyataannya Hutan Indonesia sudah banyak mengalami degradasi atau kerusakan. Forest Watch Indonesia, (2002) melaporkan laju kerusakan

hutan mencapai 1,47 juta hektar per tahun pada periode 2013-2017.

Menurut Senoaji (2011) kerusakan hutan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang tidak mempertimbangan kelestariannya, seperti pembalakan liar dan perambahan. Pembalakan liar dan perambahan semakin marak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan pertanian, perkebunan, dan lahan pemukiman serta kebutuhan lainnya. Wulan (2010) juga menambahkan bahwa kerusakan hutan tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi tetapi juga sudah merambah kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Salah satu alternatif pemecahan masalah terhadap kerusakan sumber daya hutan yaitu adanya program pemerintah melalui program Perhutanan Sosial (PS). Program PS adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk PS pada periode 2015-2019, melalui skema: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan adat dan Hutan Kemitraan (Sari *et al.*, 2019)

Wibowo *et al.*, (2013) menyebutkan bahwa Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar. Kebijakan pembangunan HTR pada intinya memberikan peluang kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman atas akses legal melalui pemberian izin pengelolaan.

Di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luasan mencapai 98 % atau 3.947 Ha yang diberikan kepada 8 Kelompok Koperasi yaitu Koperasi Harapan Bersama 408 Ha, Koperasi Bukit Rabang 598 ha, Koperasi Simpur Jaya 492 Ha, Koperasi Tani Batu Aji 485 Ha, Koperasi Leban Jaya 311 Ha, Koperasi Tapi Mandiri 511Ha, Koperasi Suban Abadi 485 Ha dan Koperasi Hijau Makmur 617 Ha (Laporan Tahunan KPHL Bengkulu Selatan Tahun 2018).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018)
Teknik penentuan responden dan informan

Responden yang dipilih dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tujuan penelitian

Jenis dan sumber data

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan

realisasi kegiatan dilapangan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan masih nihil. Implementasi HTR di Bengkulu Selatan membutuhkan evaluasi dan strategi secara menyeluruh terhadap proses karena itu Peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan, pelaku kebijakan (pemerintah daerah dan kelompok izin IUPHHK-HTR) dan lingkungan kebijakannya. Penelitian ini bertujuan, menganalisa isi izin HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan, menilai tingkat dukungan stakeholder dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan izin HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan, Merumuskan strategi implementasi HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei s/d Juli 2019. Penelitian dilaksanakan di lokasi izin HTR yaitu enam kelompok koperasi HTR di Desa Air Tenam (Koperasi Harapan Bersama), Desa Lubuk Tapi (Koperasi Leban Jaya dan Koperasi Tapi Mandiri), dan Desa Kayu Ajaran (Koperasi Bukit Rabang, Koperasi Batu Aji dan Koperasi Simpur

Jaya), yang berada di Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan studi, maka dilakukan pendekatan sebagai berikut: Penelusuran dokumen kebijakan, Penggunaan kuisioner Wawancara mendalam, FGD dan Dokumentasi

yaitu: (1) analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*), (2) *implementator*, dan (3) kelompok target.

kuantitatif. Analisis isi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan terkait HTR,

Evaluasi terhadap pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan

Pelaku kebijakan yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah selaku *implementator* dan masyarakat selaku kelompok target. Evaluasi dilakukan menggunakan analisis deskriptif.

Evaluasi terhadap dukungan pemangku kepentingan

Dukungan dari pemangku kepentingan akan dievaluasi menggunakan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*). Metode yang digunakan untuk menentukan posisi *stakeholder* dalam penelitian ini adalah analisis katagori (*analytical catagorisation*), yaitu dengan mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan kepentingan, kekuatan dan pengaruh dalam implementasi HTR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Isi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat

Kejelasan dan konsistensi tujuan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR mendefinisikan bahwa HTR sebagai hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian hutan. Definisi ini secara jelas menyebutkan bahwa pembangunan HTR bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi, yang saat ini telah sangat rendah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan HTR telah mempunyai tujuan yang jelas yaitu memperbaiki kondisi hutan produksi yang rusak dengan melibatkan masyarakat, dan tujuan ini secara konsisten diterjemahkan dalam peraturan-peraturan yang ada, antara lain dengan menetapkan lokasi HTR, kewajiban peserta menyusun RKU dan RKT, penentuan jenis tanaman pokok, dan penentuan tahapan kegiatan hutan tanaman.

Asumsi yang digunakan

Dalam turunan kebijakan HTR mengesankan bahwa Kementerian Kehutanan berasumsi bahwa masyarakat telah siap dan paham bagaimana menjadi seorang *entrepreneur*, padahal kondisi di lapangan masih sangat jauh berbeda. Meskipun telah ada pendampingan dari KPHL V Bengkulu Selatan, namun sebagian besar masyarakat masih belum mampu dan belum mengerti bagaimana menjadi seorang *entrepreneur* kehutanan sebagaimana yang dikehendaki oleh Kementerian Kehutanan.

Kebijakan HTR juga disusun berdasarkan asumsi bahwa kepala desa berkompeten untuk mengimplementasikan kebijakan HTR. Peran sentral kepala desa antara lain adalah memfasilitasi permohonan IUPHHK (Permenhut No. P.55/2011 pasal 13 ayat 1) dan mengadakan pengawasan pelaksanaan HTR (Permenhut No. P.55/2011 Pasal 24 ayat 1). Berdasarkan pengamatan di lapangan, penyerahan tanggungjawab sepenuhnya kepada kepala desa tidak dapat dilaksanakan, karena banyak kepala desa yang belum mampu untuk mengemban tugas tersebut. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam implementasi HTR, sehingga peran ini harus diambil alih oleh Dinas Kehutanan (KPHL V Bengkulu Selatan)) selaku instansi yang bertanggungjawab di bidang kehutanan kabupaten.

Struktur implementasi

Struktur implementasi yang ada hendaknya memungkinkan sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk itu, sebuah kebijakan hendaknya mempunyai pelaksana implementasi yang ahli, berkomitmen dan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.

Peran sentral KPHL V Bengkulu Selatan sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi HTR. Meskipun tugas KPHL V Bengkulu Selatan dalam peraturan perundangan hanya mencakup pemberian pertimbangan teknis kepada Bupati (Permenhut No. P.05/Menhut-II/2008 pasal 1A ayat 2 huruf d) dan melaporkan rekapitulasi perizinan IUPHHK-HTR secara

berkala setiap tiga bulan (Permenhut No. P.05/Menhut-II/2008 pasal 2 ayat 3 dan 4). Namun berdasarkan observasi di lapangan diketahui bahwa tugas KPHL V Bengkulu Selatan dalam implementasi kebijakan HTR mencakup: a) sosialisasi kebijakan kepada masyarakat selaku kelompok sasaran, b) memfasilitasi proses perizinan IUPHHK-HTR di lapangan, c) memfasilitasi pembuatan RKU dan RKT, d) melakukan pendampingan dan e) melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan HTR.

Bila ditelaah lebih lanjut, pengemban semua tugas tersebut telah diatur dengan seksama dalam kebijakan HTR. Namun, beberapa tugas yang diamanatkan kepada Gubernur (seperti sosialisasi) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi terkait peran Dinas Kehutanan (KPHL V) sebagai pemerintah daerah untuk urusan kehutanan. Sementara itu, beberapa tugas lain yang seharusnya dilakukan oleh kepala desa (fasilitasi permohonan) juga dilakukan oleh KPHL V Bengkulu Selatan mengingat kompetensi kepala desa yang belum memungkinkan untuk memfasilitasi permohonan HTR.

Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan KPHL V Bengkulu Selatan menyatakan bahwa staf KPHL V Bengkulu Selatan sebagai pendamping pelaksanaan pembangunan HTR perlu ditinjau ulang. Proses pendampingan menjadi kurang optimal karena tupoksi yang diemban oleh

staf KPHL V Bengkulu Selatan tersebut bukan hanya kegiatan HTR. Jarak rumah pendamping dengan lokasi HTR juga menjadi kendala dalam proses pendampingan. Aksesibilitas jalan yang jelek terutama pada musim hujan merupakan kendala utama dalam proses pendampingan, sehingga menyebabkan proses pendampingan menjadi tidak optimal.

Dukungan sumber daya manusia dan finansial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam mengimplementasi HTR baik pada tataran BPKSL Medan, maupun pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan (KPHL V Bengkulu Selatan) masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaksana lapangan di Dinas Kehutanan yang secara aktif menangani kegiatan HTR hingga ke lapangan hanya berjumlah 3-4 orang dengan kualifikasi Sarjana Kehutanan, di mana dua orang di antaranya telah ditunjuk sebagai pendamping kegiatan HTR. Sementara sumber daya manusia di BPSKL yang menangani kegiatan HTR berjumlah kurang dari lima orang. Dukungan sumber daya manusia KPHL V Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui tingkat partisipasi Aparat Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan HTR (Tabel 1).

Tabel 1. Tingkat Partisipasi KPHL V Bengkulu Selatan

Indikator Partisipasi	Tinggi		Sedang		Rendah	
	N	%	N	%	N	%
Keterlibatan	4	26.67	5	33.33	6	40.00
Sosialisasi	15	100.00	0	0.00	0	0.00
Rapat koordinasi	6	40.00	4	26.67	5	33.33
Pelatihan	3	20.00	5	33.33	7	46.67
Turun ke Lapangan	3	20.00	4	26.67	8	53.33
Total Partisipasi	3	20.00	3	20.00	9	60.00

Tabel 1. menunjukkan bahwa Bengkulu Selatan termasuk dalam kategori dukungan sumber daya manusia KPHL V rendah (60%) dengan tingkat keterlibatan

yang rendah (40%). Keterlibatan responden umumnya terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu (1) kelompok yang selalu dilibatkan dalam kegiatan HTR; (2) kelompok yang kadang-kadang dilibatkan; dan (3) kelompok yang tidak dilibatkan.

Kelompok pertama merupakan aparat KPHL V Bengkulu Selatan yang mengawal implementasi kebijakan HTR hingga ke lapangan. Umumnya mereka telah mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai implementasi HTR berupa pelatihan pendampingan dan pembuatan RKU/RKT. Kelompok kedua adalah merupakan aparat KPHL V Bengkulu Selatan yang sering dilibatkan dalam rapat-rapat koordinasi guna membahas perkembangan HTR atau hal lain yang berkaitan dengan HTR. Kelompok ketiga merupakan aparat KPHL V Bengkulu Selatan yang tidak dilibatkan dalam kegiatan HTR, namun pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan HTR dan secara kepegawaian termasuk dalam bidang yang membawahi proyek HTR. Dukungan sumber

daya manusia yang rendah ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan HTR.

B. Evaluasi Terhadap Pelaku Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat

Dukungan pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Stakeholders yang terlibat dan potensial terlibat dalam implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) Dinas LHK Prov Bengkulu, (2) KPHL Unit V, (3) POKJA PS, (4) Pendamping Perhutanan Sosial, (5) masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat tiga persepsi *stakeholder* mengenai tujuan dari kebijakan HTR yaitu (1) perbaikan kawasan hutan produksi; (2) kesejahteraan masyarakat; dan (3) persediaan bahan baku kayu.

Tabel 2. Persepsi Responden terhadap Tujuan HTR

No	Stakeholders	Tujuan		
		Perbaikan Hutan Produksi	Kesejahteraan Masyarakat	Persediaan Bahan Baku
1.	Dishut Prov. Bengkulu	++	+++	+
2.	KPHL	+++	+	++
3.	Pendamping	+++	++	+
4.	Pokja PS	++	+++	+
5.	Masyarakat	+	+++	++

Keterangan: + : rendah; ++ : sedang, +++ : tinggi

Dari Tabel 2. Dapat dilihat bahwa KPHL dan pendamping merupakan stakeholder yang mempunyai tujuan yang tinggi dalam memperbaiki hutan produksi yang rusak hal ini disebabkan karena ini merupakan tupoksi mereka. Sesuaidengan amanat UU 23 tahun 2014 bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi KPH adalah Rehabilitasi hutan dan reklamasi khusus untuk Rehabilitasi dan Reklamasi yang berada dalam Kawasan Hutan. Sementara itu stakeholder yang mempunyai tujuan yang tinggi terhadap kesjahteraan

masyarakat adalah DLHK Provinsi Bengkulu, Pokja PS dan Masyarakat. Karena DLHK Provinsi Bengkulu merupakan stakeholders pelaksana (Pemda Provinsi) yang beranggapan bahwa kebijakan HTR merupakan salah satu instrument pemberdayaan masyarakat dan untuk mencapai itu harus didampingi oleh Pokja PS, sedangkan masyarakat memang kelompok target yang menginginkan kesejahteraan.

Selain persepsi mereka terhadap tujuan HTR, tingkat kepentingan

stakeholders dalam implementasi kebijakan HTR dapat dilihat dari persepsi mereka terhadap kebijakan HTR, relevansi kebutuhan terhadap implementasi kebijakan HTR, motivasi keterlibatan dalam implementasi kebijakan HTR, bentuk dukungan yang

diberikan dan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Tabel 3. Penilaian Tingkat Kepentingan *Stakeholder*

No	<i>Stakeholders</i>	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
	Dinas Kehutanan Provinsi						
1.	Bengkulu	4	4	4	5	4	21
2.	KPHL	5	5	5	5	5	25
3.	Pendamping	4	3	4	4	4	19
4.	Pokja PS	5	4	5	5	5	24
5.	Masyarakat	5	5	5	4	5	24

Keterangan :P1 = persepsi mengenai ketepatan HTR sebagai resolusi masalah, P2 = relevansi kebutuhan,P3 = motivasi keterlibatan,P4 = bentuk dukungan, P5 = keuntungan yang diharapkan

Data di atas menunjukkan bahwa *stakeholders* yang memiliki nilai kepentingan tinggi adalah instansi pemerintah sektor kehutanan (KPHL dan Pokja PS), dimana implementasi kebijakan HTR merupakan salah satu tupoksi (tugas pokok dan fungsi)

mereka. Masyarakat selaku kelompok target dari implementasi kebijakan HTR juga memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. implementasi HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 4. Penilaian Tingkat Pengaruh *Stakeholder*

No	<i>Stakeholders</i>	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
1.	Dinas Kehutanan Prov Bengkulu	4	5	5	3	5	22
2.	KPHL	4	5	3	5	5	22
3.	Pendamping	3	4	4	3	4	18
4.	Pokja PS	5	5	5	5	5	25
5.	Masyarakat	4	3	4	3	4	18

Keterangan : P1 = tingkat keterlibatan P2= peran/kontribusi dalam pembuatan keputusan P3= Hubungan dengan *stakeholder* lain, P4= dukungan SDM, P5= dukungan financial

Tabel 4. Menunjukkan bahwa yang memiliki pengaruh yang besar dalam menyukseskan implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pokja PS dan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, sedangkan masyarakat memiliki pengaruh yang terkecil dalam keberhasilan implementasi HTR.

terdiri atas empat kuadran yang menggambarkan posisi masing-masing *stakeholders* dalam mendukung kebijakan HTR dapat dilihat pada gambar 1.

Dengan mengkombinasikan Tabel 3 dan Tabel 4 maka dibuat ilustrasi mengenai tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholders* dengan menggunakan *stakeholder grid*. Ilustrasi yang ditampilkan



Gambar 1. menunjukkan bahwa *stakeholders* yang termasuk ke dalam kelompok pemain kunci (*key players*) adalah KPHL, Dinas Kehutanan Provinsi dan POKJA PS. Kelompok ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi

No	Stakeholders	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
1.	Dinas Kehutanan Prov Bengkulu	5	3	3	3	4	18
2.	KPHL	5	1	1	5	1	13
3.	Pendamping	1	1	1	5	1	9
4.	Pokja PS	5	3	3	5	1	17
9.	Masyarakat	1	1	1	1	1	5

Keterangan : P1 = *reward power* P2 = *coercive power* P3 = *legitimate power* P4 = *expert power* P5 = *referent power*

Tabel 5. menunjukkan bahwa kekuatan terbesar dalam implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan dimiliki oleh Dishut Provinsi Bengkulu dan KPHL Bengkulu Selatan, sedangkan kekuatan terkecil dimiliki oleh

kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ketiga institusi ini merupakan kelompok yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penilaian kekuatan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan HTR dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 8. Penilaian Tingkat Kekuatan *Stakeholder*

masyarakat dan Pendamping. Kekuatan *reward* yang dimiliki oleh instansi kehutanan (BP2HP, DLHK Provinsi dan KPHL V Bengkulu Selatan) bersumber dari tupoksi yang dimilikinya..

Tabel 6. Posisi *Stakeholders* Berdasarkan Kekuatan, Kepentingan & Pengaruh

KEPENTINGAN RENDAH	KEKUATAN RENDAH	PENGARUH RENDAH	PENGARUH TINGGI
	KEKUATAN TINGGI	-	-
KEPENTINGAN TINGGI	KEKUATAN RENDAH	MASYARAKAT	DISHUT PROV BENGKULU KPHL
	KEKUATAN TINGGI	-	

Posisi Dinas LHK Provinsi Bengkulu dan KPHL Kabupaten Bengkulu Selatan berada dalam kelompok Kuning (zona Kuning), yaitu kelompok yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi, namun memiliki tingkat kekuatan yang rendah. Kelompok ini merupakan kelompok pendukung yang harus dilibatkan dalam implementasi HTR membangun kerjasama yang baik dengan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan kebijakan HTR.

Kelompok biru merupakan kelompok yang harus diberdayakan. Kelompok ini merupakan sasaran (target) yang akan mengimplementasikan kebijakan HTR di lapangan. Untuk itu, KPHL Kabupaten Bengkulu Selatan hendaknya mempunyai strategi yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan HTR sehingga dapat memberdayakan masyarakat.

Formulasi Strategi Implementasi Kebijakan HTR DI Bengkulu Selatan

Pada tahap pengumpulan data dilakukan identifikasi terhadap faktor- Faktor-faktor SWOT diidentifikasi berdasarkan penilaian beberapa *stakeholders* yang berasal dari unsur Dinas LHK Provinsi Bengkulu, KPHL Bengkulu Selatan dan tokoh masyarakat. Faktor-faktor yang diidentifikasi meliputi faktor yang berasal dari dalam masyarakat

(internal) dan faktor yang berasal dari luar masyarakat (eksternal).

Faktor internal

Tabel 7. IFE dalam implementasi kebijakan HTR di Bengkulu Selatan

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot Skor
A Kekuatan				
1	Adanya peraturan perundang-undangan	0.08	3.60	0.287
2	Legalitas izin	0.08	3.60	0.304
3	Legalitas kelembagaan	0.05	3.00	0.165
4	Potensi lahan garapan/ketersediaan lahan	0.07	3.60	0.270
5	Tingginya harga komoditi HHBK	0.04	3.00	0.134
6	Sudah ada jalan setapak	0.05	3.40	0.180
7	Adanya Kebebasan berusaha	0.04	2.40	0.106
8	Memiliki peta pencadangan	0.05	2.20	0.101
9	Terdapat 6 koperasi Pemegang SKIUPHHK-HTR	0.08	3.60	0.287
Total		0.56	28.40	1.834
B Kelemahan				
1	Lemahnya Kelembagaan HTR	0.08	3.60	0.287
2	Pemegang IUPHHK-HTR hanya berorientasi pada bantuan			
3	Kurangnya pendampingan penyuluh	0.07	3.80	0.264
4	Terbatasnya sumber daya keuangan	0.04	1.60	0.059
5	Rendahnya Sumber Daya Petani	0.05	2.00	0.099
6	Kurangnya pelatihan	0.06	2.40	0.137
7	Terbatasnya SDM Penyuluh Kehutanan	0.07	3.60	0.252
8	Rendahnya hargaproduk kayu	0.07	3.20	0.208
Total		0.44	20.80	1.283
Kecenderungan terhadap faktor internal		1,000		0.550

Tabel 7. IFE dalam implementasi kebijakan HTR di Bengkulu Selatan

Peubah yang memiliki nilai pengaruh terkecil dari kekuatan adalah ‘Memiliki peta cadangan’ (0.101). Hal ini kurang sesuai dengan hasil analisis korelasi yang menyebutkan bahwa tingkat kepedulian terhadap sesama (*solidarity*) berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi masyarakat.

‘Pendampingan penyuluh yang kurang merupakan peubah yang memiliki pengaruh terbesar (0.264) di sisi kelemahan, hal ini senada dengan hasil penelitian yang disampaikan Sanudin, 2015 bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap program

HTR masih rendah akibat kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi. sedangkan pengaruh terkecil adalah ‘Terbatasnya sumberdaya keuangan’ (0.059). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kelemahan masyarakat di lokasi penelitian dalam implementasi HTR umumnya adalah kesulitan dalam hal permodalan karena mayoritas masyarakat adalah petani subsisten. Mereka menanam kopi dan memanfaatkannya sebagai pendapatan utama. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam implementasi kebijakan HTR yang

menganggap bahwa tanaman kopi merupakan tanaman budidaya yang hanya boleh ditanam 40% dari total luas lahan.

Total skor untuk faktor internal kekuatan sebesar 1.834 sedangkan total skor untuk kelemahan sebesar 1.283. Kecenderungan kondisi masyarakat dalam implmentasi kebijakan HTR terhadap faktor internal (sumbu absis atau sumbu X) dalam implemementasi kebijakan HTR mempunyai skor adalah 0.550, berada di bawah skor rata-rata 2.50. Hal tersebut berarti bahwa faktor-

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot Skor
A Peluang				
1	Ketertarikan masyarakat terhadap HTR tinggi	0.07	3.40	0.235
2	Kemampuan menangkap pangsa pasar yang baik	0.06	2.80	0.159
3	Tersedianegara pendampingHTR	0.07	3.60	0.249
4	Kebutuhan kayu di Bengkulu terus meningkat sehingga HTR biasa dijadikan sumber bahan baku kayu	0.05	2.60	0.132
Total		0.25		3.052
B Ancaman				
1	Rendahnya tingkat Kualitas SDM	0.07	1.80	0.133
2	Lemahnya Kelembagaan Pemegang Izin	0.12	2.40	0.281
3	Lemahnya Dukungan Pemerintah	0.12	3.00	0.347
4	Kurangnya pengetahuan masyarakat	0.10	2.40	0.252
5	Hama dan penyakit tanaman	0.10	2.60	0.248
6	Ketidakpastian usaha	0.11	2.80	0.315
7	Banyaknya tengkulak	0.13	3.20	0.429
Total		0.75		2.005
Kecenderungan terhadap factor eksternal		1,000		1.048

Kelangkaan kayu merupakan kondisi yang memprihatinkan namun menguntungkan bagi implementasi kebijakan HTR. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha pertukangan di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan diketahui bahwa saat ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan kayu dengan jenis dan kualitas yang baik. Saat ini umumnya masyarakat desa telah menggunakan kayu jenis campuran yang berkualitas rendah sebagai bahan baku untuk pertukangan. Hal ini terpaksa dilakukan karena ketersediaan kayu dengan jenis dan kualitas yang baik sangat terbatas. Umumnya hanya beberapa responden yang memiliki

faktor kekuatan yang ada pada masyarakat belum dimanfaatkan atau direspon sepenuhnya untuk mengatasi kelemahan yang ada. Faktor ini salah satu juga penyebab lambanya realisasi HTR di Bengkulu Selatan.

Faktor eksternal

Tabel 8. EFE dalam implementasi kebijakan HTR di Bengkulu Selatan

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot Skor
A Peluang				
1	Ketertarikan masyarakat terhadap HTR tinggi	0.07	3.40	0.235
2	Kemampuan menangkap pangsa pasar yang baik	0.06	2.80	0.159
3	Tersedianegara pendampingHTR	0.07	3.60	0.249
4	Kebutuhan kayu di Bengkulu terus meningkat sehingga HTR biasa dijadikan sumber bahan baku kayu	0.05	2.60	0.132
Total		0.25		3.052
B Ancaman				
1	Rendahnya tingkat Kualitas SDM	0.07	1.80	0.133
2	Lemahnya Kelembagaan Pemegang Izin	0.12	2.40	0.281
3	Lemahnya Dukungan Pemerintah	0.12	3.00	0.347
4	Kurangnya pengetahuan masyarakat	0.10	2.40	0.252
5	Hama dan penyakit tanaman	0.10	2.60	0.248
6	Ketidakpastian usaha	0.11	2.80	0.315
7	Banyaknya tengkulak	0.13	3.20	0.429
Total		0.75		2.005
Kecenderungan terhadap factor eksternal		1,000		1.048

kayu dengan jenis yang bagus di lahan mereka.

Nilai pengarsuh terbesar pada peubah ancaman adalah 'banyaknya tengkulak' (0.429) sedangkan peubah yang mempunyai pengaruh terkecil adalah 'tingkat kualitas SDM yang rendah' (0.133). Mengingat lemahnya sistem administrasi agraria di daerah pedesaan (termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan) menyebabkan ketiadaan sertifikat tanah bagi lahan-lahan penduduk. Bukti kepemilikan umumnya berupa surat keterangan dari kepala desa dan pengakuan secara *de facto* dari masyarakat. Kawasan pencadangan HTR yang merupakan hutan produksi yang telah diokupasi oleh

masyarakat, secara *de facto* telah diakui kepemilikannya oleh masyarakat.

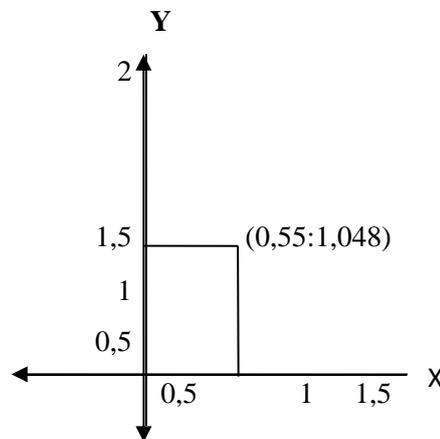
Tabel 8. menunjukkan bahwa total skor peluang dalam faktor eksternal adalah 3.052 sedangkan total skor ancaman adalah 2.005. Kecenderungan kondisi masyarakat dalam implementasi kebijakan HTR terhadap faktor eksternal (sumbu ordinat atau sumbu Y) dalam implemetasi kebijakan HTR mempunyai skor adalah 1.048, berada di bawah skor rata-rata 2.50. Menurut David (2009) hal tersebut berarti bahwa masyarakat belum mampu merespon setiap peluang yang

ada untuk menghindari ancaman yang datang dari luar.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya adalah tahap pemaduan antara faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Tahap pemaduan dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT untuk mencari alternatif strategi terbaik untuk mengimplementasikan kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan. Matrik SWOT untuk analisis mencari strategi implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Gambar 7.

Strategi implementasi kebijakan HTR terpilih yang memungkinkan untuk diimplementasikan bergantung pada hasil pertemuan sumbu x (faktor internal) dan sumbu y (faktoreksternal). Berdasarkan hasil pertemuan kedua sumbu tersebut diketahui bahwa kecenderungan posisi masyarakat pada implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kuadran I yaitu

pada titik (0.550;1.048). Berdasarkan kedudukan titik kecenderungan tersebut, maka strategi yang akan diterapkan pada implementasi kebijakan HTR adalah strategi yang bersifat agresif. Gambar 3. memperlihatkan kedudukan posisi strategis implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan.



Gambar 3. Kedudukan Posisi Strategi Implementasi Kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan

Posisi pada Kuadran 1 (satu) disebut strategi agresif/positif artinya merupakan situasi yang menguntungkan. Pada Strategi Agresif ini, implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan harus menghindari faktor-faktor yang bersifat ancaman, sedangkan peluang yang ada harus

dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan segenap kekuatan yang dimiliki masyarakat meskipun secara internal mereka juga mempunyai beberapa kelemahan dalam mengimplementasikan kebijakan HTR.

Dengan demikian, strategi implementasi kebijakan HTR yang dipilih

adalah strategi agresif, yaitu: Mengoptimalkan dukungan Pemerintah Daerah dalam percepatan implementasi HTR melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif mengenai pentingnya kebijakan HTR dan pendampingan, Menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu

KESIMPULAN DAN SARAN

Masih terdapat perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan HTR, asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan struktur implementasi yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya, Tingkat kemampuan *stakeholder* dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan HTR termasuk dalam kategori rendah. Rekomendasi strategi yang dapat dikembangkan dalam implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah: mengoptimalkan dukungan Pemda dalam percepatan implementasi HTR melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif dan menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu

Saran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat selaku *implementator* dan kelompok target dalam kebijakan HTR, mempertimbangkan kembali peraturan mengenai budidaya tanaman HTR yang menyebutkan bahwa tanaman budidaya berkayu (termasuk kopi) paling luas hanya 40% dari areal HTR, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi tanaman kopi merupakan primadona masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan KPHL Bengkulu Selatan selaku pelaksana (penentu keberhasilan implementasi HTR) hendaknya dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam implementasi kebijakan HTR.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, D., Darusman, D., Ridho Nurrochmat, D., & Wijayanto, N. (2012). STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
<https://doi.org/10.20886/jakk.2012.9.2.81-95>
- Indonesia, F. W. (2002). The State of the Forest I NDONESIA. In *Indonesia Bogor Indonesia Forest Watch Indonesia and Washington DC Global Forest Watch*.
- Joshua Schneck, D. J., & R. & Vincent Advisor. (n.d.). *Assessing the viability of HTR- Indonesia's community- based forest plantation program*.
- Obidzinski, K., & Dermawan, A. (2010). Smallholder timber plantation development in Indonesia: what is preventing progress? *International Forestry Review*.
<https://doi.org/10.1505/ifor.12.4.339>
- RI, M. K. (2010). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. *To Βημα Του Ασκληπιου*.
<https://doi.org/10.1558/jsrnc.v4i1.24>
- Sari, Y., Senoaji, G., & Suhartoyo, H. (2019). Efektivitas Program Perhutanan Sosial Dalam Bentuk Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*.
<https://doi.org/10.31186/naturalis.8.1.9170>
- Senoaji, G. (2011). KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN LINDUNG BUKIT DAUN DI BENGKULU. *Sosiohumaniora*.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5458>
- STUDI PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGELOLAAN LANSKAP AGROFORESTRI DI SEKITAR SUB DAS WAY BESAI, PROVINSI LAMPUNG. (2010). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*.
- Tuti Herawati. (2011). Hutan Tanaman Rakyat : Analisis Proses Perumusan Kebijakan dan Rancang Bangun Model Konseptual Kebijakan. *Disertasi*.